

BAB II

PENGUNAAN PMC DI BAWAH PEMERINTAHAN GOODLUCK JONATHAN DALAM KONTRA INSURGENSI BOKO HARAM DI NIGERIA

Pada pertengahan Desember 2014, Nigeria melakukan tanda tangan kontrak dengan salah satu PMC asal Afrika Selatan, yaitu *STTEP International Ltd*, untuk membantu Nigeria dalam upaya kontra insurgensi Boko Haram. Setelah ditandatanganinya kontrak tiga bulan oleh kedua belah pihak, STTEP mulai menjalankan operasinya pada Januari 2015. Keterlibatan PMC di dalam kontra insurgensi Boko Haram berujung pada keberhasilan militer Nigeria dalam memukul mundur pergerakan pemberontakan. Keberhasilan ini telah membuka ruang bernafas bagi Jonathan untuk dapat menunjukkan legitimasinya sebagai seorang pemimpin yang mampu diandalkan.

Oleh karena itu, penelitian di dalam bab ini akan dibagi ke dalam tiga pembahasan. Pada bagian pertama penulis akan membahas tentang kepemimpinan Goodluck Jonathan selama ia memerintah dan menjabat sebagai presiden Nigeria pada periode 2010-2015. Dilanjutkan pada bagian kedua, penulis akan membahas tentang insurgensi Boko Haram sebagai masalah keamanan eksistensial yang menimbulkan urgensi bagi negara Nigeria termasuk dalam era pemerintahan Goodluck Jonathan. Kemudian, pada bagian ketiga penulis akan menjelaskan tentang penggunaan PMC oleh Nigeria di bawah pemerintahan Goodluck Jonathan dalam mengatasi insurgensi atau pemberontakan Boko Haram. Pada bagian ketiga tersebut, merupakan puncak pembahasan, dimana penulis akan melihat bagaimana operasi PMC berjalan dan nantinya akan menyambung ke bagian analisis pada bab 3. Dengan demikian, keseluruhan pembahasan di dalam bab 2 akan menjadi data atau fakta yang menguatkan analisis penulis terkait faktor-faktor alasan yang membuat Nigeria di bawah pemerintahan Goodluck Jonathan menggunakan jasa PMC dalam melawan insurgensi Boko Haram.

1.1. Nigeria di bawah Pemerintahan Goodluck Jonathan (2010-2015)

Selama menjabat sebagai Presiden Republik Federal Nigeria, Goodluck Jonathan dianggap kurang memiliki legitimasi. Karir politik Jonathan telah dibentuk oleh serangkaian keadaan yang kebetulan. Dimulai pada tahun 1999, Jonathan memegang posisi Wakil Gubernur Negara bagian Bayelsa, yang terletak di wilayah Delta Niger, Nigeria Tenggara sebagai tempat asalnya. Pada tahun 2005, Goodluck Jonathan naik jabatan menjadi Gubernur menggantikan Diepreye Alamieyeseigha, yang dicopot dari jabatannya karena tuduhan pencucian uang (IRIN , 2005).

Kemudian pada tahun 2007, ketika Presiden Olusegun Obasanjo hendak mengakhiri masa jabatannya, Obasanjo mendukung pencalonan Yar'Adua yang saat itu sedang sakit sebagai presiden dan Goodluck Jonathan yang relatif tidak berpengalaman sebagai wakil presiden. Dalam hal ini, mereka yang berafiliasi dengan Partai Politik Goodluck Jonathan, yaitu Partai Demokratik Rakyat (PDP), menguatkan alasan di balik pemilihan Obasanjo atas pencalonan tersebut. Tujuan Obasanjo adalah untuk melanggengkan pengaruhnya setelah berakhirnya dua masa jabatannya dan untuk memfasilitasi kenaikan individu-individu yang rentan ke posisi-posisi otoritas (Augé, 2015).



Gambar 2.1. Pemerintahan PDP di Nigeria (Umaru Yar'Adua & Goodluck Jonathan)

Sumber: Premiumtimesng, 2014

Setelah kematian Umaru Yar'Adua pada bulan Mei 2010 yang disebabkan oleh sakit kritis, Goodluck Jonathan yang adalah wakil dari Yar'Adua akhirnya mengambil peran sebagai pelaksana tugas presiden hingga akhir masa jabatan pada tahun 2011. Adapun karakteristik pribadi, latar belakang etnis, dan asal-usul geografis Goodluck Jonathan menjadi topik perdebatan selama proses pemilihan kandidat PDP untuk pemilu 2011. Bagi mereka yang berafiliasi dengan PDP yang berasal dari wilayah utara Nigeria, terdapatnya fakta bahwa Umaru Yar'Adua tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya mengharuskan partai PDP untuk memilih kandidat dari wilayah geografis mereka (Augé, 2015).

Hal ini sesuai dengan keinginan Olusegun Obasanjo, PDP telah menerapkan kebijakan pergantian pemimpin antara wilayah utara dan wilayah selatan sejak munculnya Republik Keempat pada tahun 1999, sebuah proses yang dikenal sebagai “zonasi” (Kaledzi, 2021). Mengingat Olusegun Obasanjo, yang berasal dari negara bagian selatan Ogun, telah menjabat selama delapan tahun, maka perlu bagi orang dari wilayah utara untuk memimpin Nigeria selama delapan tahun berikutnya. Mengingat bahwa Umaru Yar'Adua tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya, adalah logis bahwa seorang kandidat dari Utara harus ditunjuk pada pemilihan umum tahun 2011.

Selain kurangnya legitimasi institusional yang terkait dengan asal-usul daerahnya, Goodluck Jonathan juga menghadapi tantangan internal di dalam PDP karena etnisitasnya. Jonathan berasal dari etnis minoritas Ijaw, yang mewakili 10 juta orang Nigeria (Augé, 2015). Selama di Abuja, sejumlah kader PDP, yang mewakili tiga kelompok etnis utama di Nigeria (Yoruba di Barat Daya, Igbo di Tenggara, dan Hausa di Utara), menekankan ketidakabsahan Goodluck Jonathan, yang diduga mengandalkan kekuasaan yang tersedia baginya sebagai kepala Federasi untuk “memaksakan” pencalonannya.

Asal-usul Presiden Goodluck Jonathan merupakan hambatan bagi kelancaran urusan setelah pemilihannya pada tahun 2011 dengan perolehan

58,89% suara (Kireev, 2011). Orang-orang Utara, pada bagian mereka, tidak memfasilitasi tugas yang mudah baginya, karena baik etnis Yoruba maupun etnis Igbo tidak memberikan dukungan yang signifikan kepada Goodluck Jonathan. Konfigurasi politik ini juga berfungsi untuk memperkuat penarikan diri dari kekuasaan. Akibatnya, etnis Ijaw mengambil peran penting dalam aparat pengambil keputusan. Industri minyak, yang mewakili 90% dari ekspor Nigeria, telah dikelola secara eksklusif sejak 2010 oleh Menteri Sumber Daya Perminyakan, Diezani Alison Madueke, seorang Ijaw dari Bayelsa (Milmo, 2015).

Kemudian, Goodluck Jonathan menunjuk Andrew Azazi, seorang Ijaw, sebagai Penasihat Keamanan Nasional Nigeria (yang bertanggung jawab atas intelijen dan koordinasi pasukan pertahanan nasional) antara tahun 2010 dan 2012. Karena Andrew Azazi tidak memberikan hasil yang nyata, terutama yang berkaitan dengan masalah Boko Haram di Timur Laut Nigeria, dan terutama karena meningkatnya tekanan dari orang-orang Utara yang menganggap adanya konsentrasi posisi strategis di tangan orang-orang etnis Ijaw, Goodluck Jonathan memilih untuk menggantikan Andrew Azazi dengan seorang pensiunan kolonel yang berasal dari kota Sokoto (Barat Laut Nigeria), yaitu Sambo Dasuki (Augé, 2015).

Setelah menjabat sebagai presiden, kritik terhadap pemerintahan Goodluck Jonathan muncul dari berbagai penjurur, dan para pemimpin Partai Demokratik Rakyat (PDP) hanya menawarkan dukungan nominal kepada Presiden. Mereka yang terus membela Presiden Goodluck Jonathan terutama adalah orang-orang yang telah diuntungkan dari berbagai kontrak pemerintah. Hal ini terutama terlihat di sektor keamanan, di mana anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan Dalam Negeri Nigeria mengalami peningkatan yang signifikan. Selama lima tahun masa jabatan Goodluck Jonathan, total pengeluaran sebesar 4,62 triliun naira (sekitar 20,7 miliar euro) dikeluarkan (Winsor, 2015). Namun, hasil yang nyata baru mulai terlihat pada bulan Februari 2015. Hingga saat itu, kurangnya peralatan dan motivasi para prajurit untuk maju ke garis depan, ditambah dengan fakta bahwa beberapa

dari mereka belum dibayar, dan kurangnya kepercayaan militer terhadap Goodluck Jonathan, secara efektif menghalangi kemungkinan keberhasilan. Kegagalan strategi yang digunakan untuk memerangi Boko Haram juga diperparah dengan banyaknya tentara yang membelot, dengan alasan tidak ingin mati di Borno.

Selain itu, telah didokumentasikan beberapa kejadian di mana gaji para prajurit ini ditahan oleh para kolonel dan jenderal yang ditempatkan di markas besar Angkatan Darat di Abuja, yang tidak secara langsung terlibat dalam operasi di lapangan. Selain itu, para prajurit muda Kristen dari bagian selatan Nigeria enggan untuk terlibat dalam pertempuran di utara. Hal ini diperparah dengan kurangnya strategi militer yang jelas dan fakta bahwa mayoritas korban Boko Haram adalah Muslim di wilayah utara. Tampaknya masuk akal untuk menanyakan tujuan akhir dari miliaran dolar yang dialokasikan untuk kontrak pelatihan dan persenjataan selama empat tahun awal masa jabatan Goodluck Jonathan. Masalah tersebut berada di bawah lingkup pemerintahan yang baru. Namun demikian, tampaknya masuk akal untuk menyatakan bahwa militer, yang diuntungkan oleh kontrak-kontrak ini (di Kementerian Pertahanan atau di Kantor Penasihat Keamanan Nasional), akan mendukung strategi Presiden untuk meningkatkan pengeluaran. Tingginya harga minyak, yang mencapai sekitar \$100 per barel selama masa jabatan Goodluck Jonathan, memungkinkan Nigeria untuk mengalokasikan sumber daya keuangan yang signifikan (TDNP, 2024).

Kelompok lain yang mendapat manfaat dari alokasi dana publik adalah kelompok militan dari wilayah Delta Niger. Sekelompok militan yang berjumlah sekitar 30.000 orang menerima amnesti pada tahun 2009 dan kemudian diberikan kontrak untuk keamanan instalasi minyak, termasuk jaringan pipa minyak dan gas di darat, serta di perairan teritorial Nigeria. Sejak dimulainya produksi minyak di Nigeria pada tahun 1958, sebagian besar perusahaan swasta lokal yang merupakan mitra perusahaan besar Barat dalam blok minyak dimiliki oleh pengusaha dari wilayah Utara, Sabuk Tengah (meliputi seluruh wilayah Utara Nigeria) atau wilayah Lagos.

Namun, tidak ada kepemilikan yang signifikan dari individu-individu di kawasan minyak Delta Niger, yang meliputi sembilan negara bagian penghasil minyak di Nigeria (Augé, 2015).

Namun demikian, suku Ijaw, yang merupakan mayoritas penduduk di negara bagian Bayelsa dan Rivers yang merupakan penghasil minyak, telah memperoleh manfaat yang signifikan dari masa jabatan Goodluck Jonathan, dengan menerima alokasi minyak mentah dalam jumlah besar yang dapat mereka jual. Pendapatan yang dihasilkan memungkinkan mereka membeli saham di blok tersebut. Masuk akal untuk memasukkan *Benedict Peters (Aiteo)*, *Igho Sanomi (Taleveras)* dan *Timi Aladetimi (Tempo Energy)* ke dalam grup ini, mengingat mereka membeli blok yang dikenal sebagai OML 29 dari *Shell*, *Total* dan *ENI* senilai \$2,58 miliar (African Energy, 2014). Para pedagang dan pengusaha, yang berasal dari etnis Ijaw dan memiliki hubungan dekat dengan Menteri Sumber Daya Perminyakan, menganggap sah-sah saja untuk mengumpulkan kekayaan dengan cepat.

Sumber daya finansial yang disebutkan di atas, yang sebelumnya tidak diberikan kepada mereka, kini dianggap sebagai hak mereka. Sejumlah pengusaha dari etnis Ijaw memandang penunjukan Presiden Goodluck Jonathan dari komunitas mereka sebagai peluang untuk memperbaiki kekurangan ekonomi yang mereka alami sejak kemerdekaan. Mereka berupaya mendapatkan lebih dari sekedar akses terbatas terhadap kekayaan minyak dan kontrak pemerintah, serta mengatasi rendahnya pembangunan di wilayah mereka, mengingat hampir seluruh minyak negara terkonsentrasi di sana. Wacana tentang “balas dendam ekonomi” ini mengakibatkan penjarahan sumber daya negara secara terorganisir selama lima tahun masa jabatan presiden Goodluck Jonathan. Goodluck Jonathan mengizinkan rombongannya untuk terlibat dalam perebutan sumber daya ini, baik karena kebencian terhadap kelompok etnis dominan lainnya yang telah memerintah Nigeria sejak kemerdekaan, atau karena kurangnya kekuatan karakter Goodluck Jonathan. Pemerintahan Jonathan sendiri terguncang oleh berbagai skandal korupsi. Penyelidikan parlemen pada tahun 2012 mengungkapkan

bahwa, hanya dalam waktu tiga tahun, pendapatan minyak negara sebesar lebih dari 5 miliar euro (\$5,7 miliar) telah dialihkan ke saluran-saluran korup. Analis politik Nenghe James mengatakan “mentalitas mementingkan diri sendiri” di kalangan elit politik telah secara dramatis memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin di Nigeria di bawah pemerintahan Jonathan (Scholz & Kriesch, 2015).

Meskipun fenomena ini bukan hal yang baru atau hanya terjadi di Nigeria, fenomena ini tampaknya telah mencapai tingkat yang sangat menonjol pada masa jabatan presiden sebelumnya. Semua duta besar, serta rekan-rekannya Jonathan di kursi kepresidenan, menggambarkan Goodluck Jonathan sebagai individu yang sangat mudah dipengaruhi, dan menyatakan bahwa ia tidak dapat menolak permintaan dari rombongannya. Sulit untuk memahami sentimen balas dendam yang dianut rombongan Jonathan tanpa mempertimbangkan konteks geopolitik Nigeria dan pengaruh beragam kelompok masyarakat terhadap perekonomian. Penafsiran ini sangat penting untuk memahami masa jabatan Goodluck Jonathan yang banyak dikritik, khususnya mengingat tingkat korupsi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang terjadi di industri minyak dan konstruksi, seperti yang dilaporkan oleh beberapa investor yang ada di Nigeria (Augé, 2015).

Meskipun kegagalan terlihat jelas dalam hal keamanan (Boko Haram) dan korupsi, khususnya di sektor hidrokarbon, beberapa keberhasilan masih bisa diatribusikan kepada Goodluck Jonathan. Pertama, perlu dicatat bahwa beberapa individu, biasanya mereka yang memiliki keahlian teknis, mampu menjalankan peran mereka di beberapa kementerian utama di Nigeria tanpa pengaruh politik yang berlebihan. Hal ini misalnya terlihat pada masa jabatan Menteri Pertanian Akinwumi Adesina yang berlangsung selama empat tahun dan telah dilakukan beberapa kali reformasi. Beliau meraih gelar PhD di bidang Ekonomi Agraria dari Universitas Purdue dan telah mendirikan program asuransi yang memberikan kompensasi selama banjir dan kekeringan, yang sering kali merugikan petani kecil (Augé, 2015).

Selain itu, beliau mempelopori pengembangan Agenda Transformasi Pertanian (ATA) bekerja sama dengan para ahli di bidangnya. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan meningkatkan produksi lokal sebesar 20 juta ton, dengan tujuan mencapai swasembada beras pada tahun 2015. Masih belum dapat dipastikan apakah reformasi ini akan membuahkan hasil yang nyata. Namun, menteri pertanian Nigeria telah menunjukkan kredibilitas yang cukup mengenai masalah ini untuk terpilih sebagai Presiden Bank Pembangunan Afrika (AfDB), peran yang diemban sejak September 2015 (MoneyCentral, 2023).

Tokoh lain yang patut dicatat dari masa jabatan Goodluck Jonathan adalah Ngozi Okwonjo Iweala, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan dari tahun 2011 hingga 2015. Sebelumnya, Iweala menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dari tahun 2007 hingga 2011. Pada bulan Januari 2012, Iweala sangat sukses dalam mengurangi subsidi bahan bakar, yang berdampak buruk pada keuangan pemerintah karena jumlah yang signifikan yang dialokasikan untuk importir bensin sebagai imbalan atas harga yang diatur. Lebih dari \$10 miliar (2.000 juta Naira) dihabiskan hanya untuk mengimpor bensin pada tahun 2011. Akibatnya, harga per liter meningkat dari 67 menjadi 97 Naira (setara dengan 43 sen euro pada saat itu) (Augé, 2015).

Terlepas dari tantangan-tantangan yang disebutkan di atas, Iweala juga berhasil meningkatkan kredibilitas Nigeria dalam hal ekonomi, terutama melalui kebijakan anggarannya yang bijaksana dan pemahamannya yang komprehensif tentang sistem moneter internasional. Namun, banyak pengamat mengatakan bahwa dia mendukung rezim di mana korupsi mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu skandal keuangan yang paling menonjol yang terjadi selama periode ini adalah hilangnya miliaran dolar pendapatan minyak pada tahun 2013. Peristiwa ini menjadi perhatian publik oleh Gubernur Bank Sentral Nigeria (CBN), Sanusi Lamido, dalam sebuah surat yang dikirimkan kepada Presiden Goodluck Jonathan. Dalam surat ini, Lamido menyoroti perbedaan pendapatan dari

perusahaan minyak nasional (NNPC) antara Januari 2012 dan Juli 2013, dengan mencatat perbedaan beberapa puluh miliar (PremiumTimes, 2013).

Atas kejadian ini, Lamido diberhentikan pada bulan Februari 2014 karena mengungkapkan informasi tersebut kepada publik. Sanusi Lamido menyatakan bahwa dirinya terpaksa mengambil tindakan tersebut karena kurangnya tanggapan dari kantor kepresidenan. Dalam hal ini, Menteri Keuangan Iweala adalah pendukung setia peminggiran Sanusi Lamido, yang pada akhirnya menyebabkan dirinya sendiri didiskreditkan. Namun, Iweala dapat beralih ke peran baru pada bulan September 2015, dengan menjabat sebagai Penasihat Senior di Lazard, sebuah bank investasi, dan Ketua Gavi, Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (WHO, 2015).

Pencapaian penting lainnya adalah manajemen yang efektif dari krisis Ebola yang terjadi pada tahun 2014, dengan beberapa kasus yang dilaporkan di Lagos dan Delta Niger. Respons Nigeria secara signifikan dipengaruhi oleh tindakan para diplomat dan pengamat asing. Nigeria merespons dengan cepat dan efektif dalam mengelola situasi, yang dapat mengakibatkan hasil yang jauh lebih buruk jika epidemi berkembang di daerah perkotaan seperti Lagos. Pemerintah pusat, bersama dengan negara-negara bagian, memfasilitasi pencapaian status “bebas Ebola” di Nigeria dalam waktu yang relatif singkat, sangat berbeda dengan upaya yang berkepanjangan di Liberia, Sierra Leone, dan Republik Guinea, yang berlanjut hingga akhir 2015. Kesimpulan para diplomat adalah bahwa ketika taruhannya tinggi, Nigeria memiliki kapasitas untuk mengatasi tantangan dengan cara yang cepat dan efektif. Goodluck Jonathan menunjukkan respons yang cepat dan tegas terhadap krisis, yang kemungkinan besar diinformasikan oleh latar belakang ilmiahnya sebagai ahli zoologi, yang mungkin telah meningkatkan kesadarannya akan tingkat keparahan dan pola penularan penyakit ini (CDC, 2014).

Selain itu, terdapat konsensus di antara para pengamat bahwa Goodluck Jonathan memajukan demokrasi dengan mewajibkan para pemilih untuk mendaftarkan sidik jari mereka untuk mencegah kecurangan di dalam pemilu. Pendekatan ini, yang diadopsi secara luas oleh Ketua Komisi

Pemilihan Umum Nasional Independen (INEC), Profesor Attahiru Muhammadu Jega, berkontribusi pada pemilu Maret 2015 sebagai pemilu yang paling kredibel di Republik Keempat Nigeria, atau sejak tahun 1999. Hal ini secara signifikan mengurangi insiden kecurangan pemilu dan mencegah Partai Demokrasi Rakyat (PDP) pimpinan Goodluck Jonathan meraih kemenangan yang dianggap tidak sah, sehingga menghindari kekerasan pascapemilu yang biasa terjadi (Augé, 2015).

Selain itu, Goodluck Jonathan saat ini sedang mendirikan sebuah yayasan, *Goodluck Jonathan Foundation*, yang akan didedikasikan untuk demokratisasi Afrika. Oleh karena itu, Jonathan berusaha untuk memajukan kepergian politiknya dan pengalihan kekuasaan di Nigeria. Disamping itu, Jonathan juga telah ditunjuk sebagai Kepala Pengamat oleh organisasi Persemakmuran untuk pemilihan presiden dan parlemen yang dijadwalkan pada tanggal 25 Oktober 2015 di Tanzania (The Commonwealth, 2015). Namun demikian, reputasinya sebagai pendukung prinsip-prinsip demokrasi dapat menimbulkan tanggapan skeptis, terutama mengingat insentif keuangan yang substansial yang dilaporkan dimobilisasi selama hari-hari terakhir kampanye pemilihannya untuk mengamankan kemenangan Partai Demokratik Rakyat (PDP).

Dalam hal ini, selama masa pemerintahannya, Jonathan menghadapi berbagai tantangan dalam merealisasikan janji-janji kampanyenya. Administrasinya dinilai kurang efektif dalam mengatasi permasalahan struktural yang dihadapi Nigeria, terutama di bidang ekonomi dan keamanan. Disamping itu, Jonathan menghadapi tekanan yang cukup besar dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan Uni Afrika, yang mungkin telah mempengaruhi keputusannya untuk memberikan ucapan selamat kepada lawannya, Muhammadu Buhari sebagai presiden Nigeria selanjutnya sebelum pengumuman resmi hasil pemilu di tahun 2015 (Augé, 2015).

1.2. Insurgensi Boko Haram di Nigeria

Nigeria dalam perkembangannya telah diwarnai oleh sejarah panjang konflik komunal dan kekerasan etnoreligius. Konflik yang terjadi di negara ini secara signifikan disebabkan oleh keberagaman etnis dan agama yang gagal hidup secara harmonis, serta memiliki akar permasalahan pada aspek politik, khususnya terkait dengan efektivitas kontrol pemerintah dalam mengelola negara (Goldy, 2022, p. 16). Hal inilah yang menjadi dasar munculnya kelompok insurgensi atau pemberontakan seperti Boko Haram. Boko Haram adalah manifestasi nyata dari kegagalan pemerintah dalam mengatasi isu-isu mendasar yang melanda Nigeria. Aksi insurgensi Boko Haram, tidak hanya memanfaatkan ketegangan etnoreligius yang ada, tetapi juga mengeksploitasi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dan kesenjangan sosial-ekonomi yang meluas. Kehadiran dan perkembangan Boko Haram dapat dipandang sebagai konsekuensi langsung dari ketidakmampuan pemerintah Nigeria dalam mengelola keberagaman, menjamin keadilan sosial, dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara bagian di Nigeria.

Boko Haram yang secara resmi bernama *Jama'atu Ahlus Sunnah Lidda'wa wal-Jihad* ("kelompok pengikut Sunnah untuk dakwah dan jihad") merupakan organisasi militan Islam yang beroperasi di Nigeria (Tampomuri, 2019). Organisasi atau kelompok ini berdiri atas dasar kepercayaan bahwa politik di utara telah dikuasai oleh sekelompok Muslim palsu yang korup (Walker, 2012). Kemunculan kelompok ini dapat diatribusikan pada ketidakpuasan terhadap pemerintah di kalangan segmen masyarakat tertentu di Nigeria. Faktor-faktor seperti keberagaman etnis dan agama, serta tingginya tingkat korupsi dan kesenjangan ekonomi yang dialami oleh komunitas Muslim di Nigeria berkontribusi pada munculnya gerakan pemberontakan Boko Haram. Selain itu, penetrasi nilai-nilai Barat dan westernisasi di Nigeria juga menjadi katalis bagi pemberontakan kelompok ini. Dalam hal ini, Boko Haram meyakini bahwa ketidakstabilan di Nigeria bersumber dari pengaruh Barat, yang mereka anggap sebagai ancaman

terhadap integritas negara dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Goldy, 2022).

Insurgensi Boko Haram bermula pada Juli 2009, ketika kelompok militan Islamis dan jihadis Boko Haram memulai pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Nigeria (BBC, 2016). Konflik ini terjadi dalam konteks permasalahan jangka panjang kekerasan religius antara komunitas Muslim dan Kristen di Nigeria, dengan tujuan akhir kaum pemberontak untuk mendirikan negara Islam di wilayah tersebut. Pemberontakan awal Boko Haram mengalami kegagalan, dan pemimpinnya, Mohammed Yusuf, tewas di tangan pemerintah Nigeria (Andrew Walker, *The Guardian*, 2016). Yusuf mendirikan kelompok ini pada tahun 2002 dengan pandangan untuk menentang pendidikan Barat bersama pengikutnya. Pasca kematian Yusuf, Boko Haram dipimpin oleh Abubakar Shekau, yang mengakibatkan gerakan ini terpecah menjadi kelompok-kelompok otonom dan memulai insurgensi.

Meski mendapat tantangan dari rival internal, seperti faksi konservatif Salafi pimpinan Abu Usmatul al-Ansari dan faksi Ansaru, Shekau menjadi pemimpin *de facto* insurgensi dan sebagian besar berhasil mencegah berbagai faksi Boko Haram saling bertempur, sebaliknya berfokus pada upaya menggulingkan pemerintah Nigeria (BBC, 2018). Dengan dukungan dari organisasi jihadis lain termasuk al-Qaeda dan al-Shabaab, taktik Shekau ditandai oleh kekejaman ekstrem dan penargetan eksplisit terhadap warga sipil di Nigeria.

Setelah bertahun-tahun berkonflik, Boko Haram menunjukkan peningkatan agresivitas dan mulai menguasai wilayah-wilayah luas di Nigeria bagian timur laut. Eskalasi kekerasan mencapai puncaknya pada tahun 2014 dengan tercatatnya 10.849 kematian, bersamaan dengan ekspansi teritorial Boko Haram yang signifikan (Hughes, 2014). Pada periode yang sama, insurgensi ini menyebar ke negara-negara tetangga, termasuk Kamerun, Chad, Mali, dan Niger, sehingga berkembang menjadi konflik regional yang substansial di kawasan Sub-Sahara Afrika. Sementara itu, Shekau berupaya meningkatkan statusnya di kalangan jihadis internasional dengan secara

diam-diam menjalin aliansi dengan *Islamic State of Iraq and the Levant* (ISIL) pada Maret 2015. Langkah ini menghasilkan transformasi Boko Haram menjadi “Provinsi Afrika Barat Negara Islam” (*Islamic State's West Africa Province/ISWAP*) (CTC Sentinel, 2021).

Pada pertengahan dekade 2010-an, pemberontakan Boko Haram mencapai puncaknya, menjadikan kelompok ini sebagai organisasi teroris paling mematikan di dunia berdasarkan jumlah korban jiwa yang ditimbulkannya (Katie Pisa & Tim Hume, CNN, 2015). Dalam upaya memfasilitasi dialog antara pemerintah dan kelompok militan yang sangat berbahaya ini, pemerintahan Presiden Goodluck Jonathan membentuk sebuah komite untuk menawarkan amnesti kepada Boko Haram. Beberapa aspek penting dari rencana amnesti tersebut meliputi pemberian pengampunan kepada para pejuang Boko Haram dan kesediaan untuk mendengarkan aspirasi berbagai kelompok etnis yang berafiliasi dengan organisasi tersebut, dengan tujuan mengakhiri kekerasan yang berkelanjutan. Namun, tawaran amnesti ini ditolak oleh Boko Haram melalui sebuah pesan audio yang disebarkan oleh pemimpin mereka. Penolakan tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa perjuangan mereka bertujuan untuk mendirikan negara Islam di wilayah utara Nigeria yang mayoritas berpenduduk Muslim. Selain itu, kelompok ini juga mengklaim bahwa justru pemerintahlah yang melakukan kekejaman terhadap umat Muslim (BBC, 2013).

Pada tahun 2015, sebuah koalisi negara-negara Afrika dan Barat yang dipimpin oleh Nigeria melancarkan ofensif di Afrika Barat, yang berhasil memukul mundur kelompok pemberontak. Akibatnya, kelompok Islamis terpaksa mundur ke Hutan Sambisa dan basis-basis mereka di Danau Chad. Peristiwa ini memicu ketidakpuasan di kalangan Boko Haram terkait berbagai permasalahan internal. Akibatnya, sejumlah elemen yang tidak puas dalam gerakan tersebut beraliansi dengan komando pusat *Islamic State* (IS) dan menantang kepemimpinan Abubakar Shekau, yang berujung pada perpecahan kekerasan di antara para pemberontak. Pasca perpecahan tersebut, kelompok Shekau umumnya tetap dikenal sebagai “Boko Haram”, sementara

kelompok yang membelot melanjutkan operasi mereka sebagai *Islamic State West Africa Province* (ISWAP) di bawah pimpinan Abu Musab al-Barnawi. Kedua faksi ini kemudian terlibat dalam konflik satu sama lain, sambil tetap meluncurkan pemberontakan terhadap pemerintah setempat. Setelah mengalami serangkaian kemunduran, Boko Haram dan ISWAP meluncurkan ofensif baru pada tahun 2018 dan 2019, yang kembali meningkatkan kekuatan mereka (Africa Defense Forum, 2023).

Pada Mei 2021, terjadi perkembangan signifikan dalam dinamika konflik di Nigeria utara ketika *Islamic State West Africa Province* (ISWAP) meluncurkan serangan terhadap militan Boko Haram di Hutan Sambisa. Dalam pertempuran tersebut, pemimpin Boko Haram, Abubakar Shekau, dilaporkan tewas setelah meledakkan rompi bunuh diri yang dikenakannya (Burke & Akinwotu, 2021).

Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada Agustus 2021, komandan utama ISWAP, Abu Musab al-Barnawi, juga tewas. Pasca kematian Shekau, terjadi perubahan dramatis dalam lanskap pemberontakan. Sejumlah besar militan Boko Haram menyerahkan diri, sementara yang lainnya membelot ke ISWAP. Menurut data yang dirilis oleh Angkatan Pertahanan Nigeria, per 5 April 2022, total 51.114 pemberontak dan anggota keluarga mereka telah menyerahkan diri. Jumlah ini terdiri dari 11.398 pria, 15.381 wanita, dan 24.335 anak-anak. Angka ini terus meningkat secara signifikan, mencapai lebih dari 100.000 orang pada Juli 2023 (The Guardian, 2023). Menanggapi perkembangan ini, seorang komandan Satuan Tugas Gabungan mengekspresikan optimisme bahwa krisis Boko Haram akan segera berakhir. Namun, ia juga mengingatkan pasukan untuk tetap waspada dan tidak memberi kesempatan kepada para teroris untuk pulih, mereorganisasi, dan meluncurkan serangan baru. Komandan tersebut menyatakan, “Kita hampir mencapai tujuan, jadi mari kita pertahankan momentum ini (Matazu, 2023).” Dalam pernyataan tersebut, meskipun terdapat tanda-tanda positif atas menurunnya intensitas pemberontakan, namun pada akhirnya berujung pada situasi keamanan yang tidak pasti.

1.3. Penggunaan *Private Military Company* (PMC) dalam Kontra Insurgensi Boko Haram di Nigeria

Tantangan keamanan telah menjadi permasalahan yang sudah lama ada di banyak negara Afrika. Tantangan-tantangan ini dapat bersumber dari perbedaan etnis, ekstremisme agama, persaingan politik, dan ketidakpuasan terhadap tata kelola pemerintahan. Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk mengendalikan ketidakamanan di wilayahnya. Namun, banyak negara di Afrika gagal memenuhi tugas penting ini. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi tantangan keamanan di wilayah mereka dapat mengakibatkan krisis perpindahan penduduk, baik internal maupun eksternal, yang berpotensi menimbulkan dampak berantai pada negara-negara tetangga dan, yang terpenting, hilangnya nyawa manusia (Enos, 2023).

Banyak negara di Afrika mengalami ketidakstabilan politik dan konflik kekerasan, yang merupakan ciri-ciri negara rapuh. Secara tradisional, ketika konflik terjadi dan negara-negara Afrika tidak mampu mengatasinya sendiri, organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan bantuan kepada negara-negara tersebut. Namun, telah terjadi pergeseran dalam cara beberapa pemerintah di Afrika merespon tantangan keamanan di negara mereka dengan mempekerjakan Perusahaan Militer Swasta (*Private Military Company*/PMC).

Insurgensi Boko Haram di Nigeria telah menunjukkan adanya urgensi bagi pemerintah dalam menetapkan agenda keamanan yang serius untuk penanganan Boko Haram. Keterlibatan STTEP adalah yang pertama dari PMC melawan kelompok ekstremis Islam yang terdokumentasi di Afrika. Intervensi PMC yang paling dikenal di Afrika sebelumnya ditargetkan pada gerakan politik pemberontak dan gerilyawan yang memperjuangkan kekuasaan. Contoh intervensi terdahulu termasuk keterlibatan EO, yang melakukan intervensi terhadap *União Nacional para a Independência Total de Angola* (UNITA) di Angola dan *Revolutionary United Front* (RUF) di Sierra Leone; *Sandline International* yang berbasis di Inggris, yang berencana menargetkan *Bougainville Resistance Army* di Papua Nugini pada tahun 1997

(Dorney, 1998); dan kontraktor *AS Military Professional Resources Inc.*, yang membantu Angkatan Darat Kroasia melawan Angkatan Darat Republik Serb Krajina selama ‘Operasi Badai’ 1995 (Goulet 1998; Shearer 1998a; Silverstein 2000).

Perlu dicatat bahwa baik EO maupun *Sandline International* memiliki hubungan erat dengan *Branch Heritage Group*, perusahaan pertambangan dan eksplorasi, serta *Heritage Oil & Gas*, jaringan korporasi mineral dan permata internasional yang berbasis di London. Kontraktor militer swasta yang memerangi Al-Qaeda di Afghanistan serta perekrutan *Blackwater* oleh pemerintah AS dalam ‘Perang Melawan Teror’ dapat diajukan sebagai contoh yang lebih baru (Adamo, 2020).

Berdasarkan konteks pemberontakan non-negara dan respons negara yang tidak memadai ini, dapat dikatakan bahwa Nigeria secara historis telah mengalami dan masih mengalami keterlibatan keamanan swasta yang berbeda namun terkait. Tentara bayaran gaya lama dipekerjakan selama Perang Biafra (1967–1970), oleh kedua belah pihak yang bertikai di Nigeria dan Biafra. Kemudian dalam beberapa tahun terakhir, jenis penyedia keamanan swasta yang berbeda muncul, yaitu PSC, yang disewa untuk melindungi infrastruktur energi kritis, terutama mengingat pencurian minyak ilegal besar-besaran dan sabotase pipa, yang telah menjadi masalah yang semakin menonjol di Nigeria (Zabyelina & Kustova, 2015, p. 532). Selain itu, perusahaan swasta terkadang memilih solusi dalam kerangka keamanan nasional yang ada. *Shell* dan *Chevron*, misalnya, membayar militer dan polisi Nigeria untuk mengamankan fasilitas mereka di negara itu (Avant, 2004, p. 154).

Bukti yang semakin bertambah tentang apa yang sedang terjadi di Nigeria utara terungkap melalui sumber-sumber dari Afrika Selatan. Kehadiran tentara bayaran Afrika Selatan yang telah dikonfirmasi, bersama dengan kontraktor dari negara lain (Korea Selatan, Ukraina, dan bekas Republik Soviet), diungkapkan oleh sumber pertahanan dari Pretoria, yang menyatakan bahwa pasukan asing tersebut terkait dengan manajemen EO.

Sumber tersebut mengatakan bahwa beberapa ratus orang asing terlibat dalam menjalankan operasi ofensif besar, dan dibayar sekitar £270 per hari secara tunai (Africa Research Bulletin, 2015). Dalam hal ini, ketidakcukupan pemerintah dan militer, dan penggunaan keamanan swasta dapat dianggap sebagai dua sisi dari koin yang sama, di mana keduanya merupakan bagian dari kerangka perang baru dan erosi kekuasaan negara.

Melihat situasi yang terjadi di Nigeria, menuju akhir masa kepemimpinan Goodluck Jonathan pada tahun 2015, negara tersebut masih belum mampu untuk mengatasi Boko Haram. Pada akhirnya, untuk pertama kalinya pemerintah Nigeria mencoba menghubungi PMC setelah mendapatkan tekanan internasional atas kasus penculikan 276 siswi sekolah di Chibok. Pemimpin dari PMC *Specialized Tasks, Training, Equipment and Protection* (STTEP), yaitu Eeben Barlow. Pada tahun 2014, Barlow mengungkapkan bahwa presiden Goodluck Jonathan mengadakan pertemuan dengan pemimpin PMC Blackwater, yaitu Erik Prince (Barlow, 2018). Dalam pertemuan tersebut, Prince menawarkan solusi untuk menghancurkan Boko Haram dengan bayaran sebesar 1,5 milyar USD (Cole & Scahill, 2016). Namun, tawaran tersebut ditolak oleh Jonathan.

Keterlibatan PMC baru terealisasi pada awal tahun 2015, ketika STTEP dikontrak untuk periode tiga bulan menjelang pemilihan umum di Nigeria (Adamo, 2020). STTEP sendiri adalah PMC yang didirikan pada tahun 2006 dan berbasis di Afrika Selatan. Perusahaan ini didirikan oleh Eeben Barlow, seorang mantan letnan kolonel di Angkatan Pertahanan Afrika Selatan dan pendiri PMC *Executive Outcomes* (EO), yang aktif beroperasi pada tahun 1990-an. Jasa yang disediakan oleh STTEP meliputi layanan konsultasi dan pelatihan di bidang militer, intelijen, dan penegakan hukum. Adapun kompetensi yang dimiliki oleh STTEP meliputi aspek-aspek kenegaraan, strategi peperangan, operasi kontra insurgensi, dan penanggulangan terorisme (STTEP International, 2009). Dalam operasinya di Nigeria, STTEP membantu militer Nigeria dalam pembentukan unit kontra-insurgensi khusus, yang kemudian dikenal sebagai 72 *Mobile Strike Force*.

Selama operasi tersebut, personel STTEP diintegrasikan ke dalam struktur Angkatan Bersenjata Nigeria, dengan Barlow sendiri diangkat menjadi mayor jenderal (Nielsen, 2016).



Gambar 2.2. 72 Mobile Strike Force di Nigeria

Sumber: Zdalmano, in Nairaland Forum, 2022

Menurut Siobhán O’Grady dan Elias Groll (2015), seorang sumber anonim dari Amerika yang berbicara kepada media *Foreign Policy* mengungkapkan bahwa intervensi tentara bayaran terjadi ketika Amerika Serikat menolak menyediakan senjata dan memblokir penjualan helikopter serang Cobra dari Israel ke Nigeria. Amerika Serikat telah lama menolak menyediakan peralatan militer ke Nigeria karena pelanggaran hak asasi manusia, sehingga memicu keluhan Nigeria tentang kurangnya sumber daya dalam perang melawan Boko Haram. Selain itu, Amerika Serikat skeptis terhadap kemampuan Angkatan Bersenjata Nigeria untuk mengoperasikan helikopter tersebut dengan benar. Menyewa kendaraan dari Afrika Selatan, dengan pilot terlatih, dianggap sebagai pilihan yang layak. Pernyataan resmi pemerintah Nigeria membantah intervensi tentara bayaran. Laksamana Muda Gabriel E. Okoi, kepala intelijen pertahanan Nigeria, hanya mengakui bahwa kontraktor Afrika Selatan telah dipekerjakan beberapa bulan sebelumnya untuk membantu melatih pasukan Nigeria. Kemudian, juru bicara pemerintah

Mike Omeri menolak mengkonfirmasi jumlah orang asing yang terlibat, hanya mengatakan bahwa mereka akan tinggal sampai pasukan lokal mahir menangani peralatan militer (Africa Research Bulletin, 2015).

Dalam wawancara dengan *Voice of America*, Presiden Goodluck Jonathan mengatakan dua perusahaan menyediakan ‘pelatih dan teknisi’ dari Afrika Selatan, Rusia, dan Korea Selatan untuk membantu pasukan Nigeria, tetapi mereka tidak terlibat dalam pertempuran garis depan melawan Boko Haram. Dia tidak menyebutkan nama perusahaan, kebangsaan, atau jumlah (Cropley & Lewis, 2015). Di sini terlihat pola umum dalam intervensi keamanan swasta, yaitu penolakan pemerintah klien untuk mengakui bahwa kekuatan eksternal dikerahkan di wilayahnya sendiri. Demikian pula, PMC tidak suka secara terbuka mengungkapkan operasi mereka. Faktanya, orang-orang Afrika Selatan melakukan operasi militer pada malam hari, seperti yang dinyatakan oleh pejabat senior pemerintah Nigeria bahwa mereka ‘benar-benar tidak ingin membiarkan orang tahu apa yang sedang terjadi’ (Nossiter, 2015). Dalam hal ini, klaim terkait keterlibatan militer asing sebagai ‘kapasitas penasihat’ lebih dapat diterima oleh publik domestik dan internasional karena dianggap kurang agresif dan lebih suportif.

Seperti yang sudah terlihat, struktur negara Nigeria dan interaksi berbagai faktor (keserakahan ekonomi dan keluhan, ketegangan etnis dan agama, peluang politik, dan respons negara yang tidak berhasil terhadap pemberontakan) menjadi alasan kegagalan untuk melawan ancaman dari Boko Haram. Akibatnya, pada Januari hingga Maret 2015, dengan mengenakan pakaian khaki dan baju besi, mengoperasikan helikopter serang dan kendaraan personel lapis baja dengan senapan mesin kaliber tinggi, ratusan tentara bayaran dari Afrika Selatan dilaporkan berjuang untuk merebut kembali kota-kota dan desa-desa yang direbut oleh Boko Haram.

Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh beberapa diplomat Barat, yang mengklaim bahwa orang-orang Afrika Selatan memainkan ‘peran operasional utama’ dan menjelaskan bahwa tentara bayaran ‘melakukan pekerjaan berat’ sementara Angkatan Bersenjata Nigeria mengklaim ‘kesuksesan’ (Nossiter,

2015). Meskipun pemerintah Nigeria menyangkal, keterlibatan tentara STTEP dalam pertempuran tidak disangkal oleh Barlow: ‘Jika Anda ingin seseorang berperang untuk Anda, Anda perlu bersedia menunjukkan jalan’ (Nielsen, 2016, p. 9). Operasi tentara bayaran menargetkan perkemahan Boko Haram di wilayah Sambisa, area seluas 60.000 kilometer persegi di mana gadis-gadis Chibok diduga dibawa (Nossiter, 2015). Rencana awalnya adalah melatih tim untuk membantu membebaskan gadis-gadis sekolah tersebut. Menurut Barlow, misi ini kemudian beralih menjadi peran ofensif untuk menghentikan kemajuan cepat Boko Haram dan menciptakan ruang untuk memungkinkan pemerintah mengadakan pemilihan (Barlow, 2018; Freeman, 2015). Akibatnya, STTEP membawa sekelompok tentara yang sangat terampil, terlatih, dan berpengalaman yang telah melakukan perang melawan pemberontakan di benua Afrika sejak tahun 1980-an. STTEP juga menyediakan kapasitas udara yang mampu mengangkut, mengevakuasi, dan memasok pasukan, melakukan misi tempur udara-ke-darat, dan membantu pengumpulan intelijen. Menurut pejabat PMC, tentara bayaran menggunakan kekuatan udara dalam pertempuran secara langsung (Freeman, 2015; O’Grady & Groll, 2015).

Disamping itu, PMC tetap pada prioritas untuk memberikan bantuan yang memadai kepada Angkatan Bersenjata Nigeria. Tindakan Boko Haram menimbulkan ketakutan tidak hanya di kalangan penduduk setempat tetapi juga di unit-unit militer yang menghadapi kelompok tersebut. Hal ini mengakibatkan banyak unit yang terdesak dan mundur dari area pertempuran, meninggalkan peralatan berharga yang kemudian akan digunakan Boko Haram dalam kampanye terornya (Solomon, 2017, p. 66). Alasan ketidakefisienan ini memiliki asal-usul historis. Meskipun militer Nigeria telah menerima peralatan bergaya Barat (militer awalnya dimodelkan pada militer Inggris selama Perang Dunia I dan II, ketika harus mempertahankan wilayah domestik dan kolonialnya), doktrin dan strateginya belum disesuaikan dengan peperangan yang diperlukan untuk bertindak melawan

Boko Haram. Pada dasarnya, pasukan tidak dilatih dengan memadai untuk melaksanakan kampanye kontra-pemberontakan (Noakes, 2014).

STTEP *International Ltd* berkontribusi dengan doktrin kontra-pemberontakan yang solid yang disebut '*relentless pursuit*' (juga digunakan oleh EO), yang terdiri dari membingungkan, menyebar, dan memberikan tekanan pada musuh melalui serangan kecil yang *mobile*, memaksa mereka mundur, dan kemudian mengejar tanpa henti, sehingga melelahkan mereka dan memfasilitasi pemusnahan mereka. Pengejaran ini juga mencakup meniru taktik *hit-and-run* Boko Haram dengan serangan tanpa henti dalam kerangka '*perang mobile* yang tidak konvensional' (Freeman, 2015). Berkenaan dengan konsekuensi militer dari intervensi tersebut, telah dilaporkan bahwa pengerahan tentara bayaran memiliki efek mengubah arah upaya militer. Setelah pelatihan, Pasukan 72 *Mobile Strike Force* merebut kembali kota Mafa. Divisi Infanteri ke-7 kemudian menduduki kota tersebut, dan Pasukan 72 *Mobile Strike Force* kembali ke Maiduguri. Akhirnya, pada pertengahan April 2015, pemerintah Nigeria menegaskan bahwa 10 dari 14 pemerintah lokal telah direbut kembali oleh pasukan Nigeria dalam tiga minggu sebelumnya (O'Grady & Groll, 2015).

Dampak dari keterlibatan STTEP juga terlihat pada pemerintahan Muhammadu Buhari. Buhari menggantikan Jonathan setelah kekalahan Jonathan dalam pemilu 2015. Seperti yang dilaporkan oleh Kantor Berita Anadolu Turki (Campbell, Council on Foreign Relations, 2015), Presiden Buhari menggunakan jasa STTEP, menyewa peralatan dan sekitar 250 personil, meskipun sebelumnya telah mengutuk penggunaan tentara bayaran Afrika Selatan sebagai hal yang "memalukan" selama kampanye pemilu (Campbell, 2015; Varin, 2016). Meskipun pemerintah Nigeria menyangkal laporan tersebut, perekrutan kembali tentara bayaran ini sedang dipertimbangkan oleh Kementerian Pertahanan dan Militer Nigeria (Campbell, Council on Foreign Relations, 2015). Barlow sendiri memperingatkan bahwa meskipun musuh telah kalah, mereka tetap mampu "berkumpul kembali dan melanjutkan aksi teror mereka" (Freeman, 2015).

Demikian pula, pada awal 1997, ketika presiden Sierra Leone, Ahmed Tejan Kabbah, memutuskan kontrak EO, PMC memprediksi bahwa pemerintahan Kabbah akan jatuh dalam waktu seratus hari jika mereka meninggalkan negara itu. Prediksi ini memang terbukti dengan kejadian-kejadian selanjutnya, ketika tentara dari Sierra Leone yang bersimpati pada RUF menggulingkan pemerintahan Kabbah yang terpilih secara demokratis 95 hari kemudian (Howe 1998, 321; Percy 2007, 210).

Kemudian, dari tahun 2017 hingga 2018, *Four-Troop*, sebuah perusahaan militer yang didirikan oleh para veteran Angkatan Pertahanan Israel (IDF), melatih Angkatan Udara Nigeria dalam strategi kontra-terorisme, perang asimetris, dan keamanan bandara. Pada tahun 2020, Sekolah Infanteri Angkatan Darat Nigeria mempekerjakan *Starter Point Integrated Services* (SPIS) Ltd untuk melatih lebih dari seribu pasukan di kamp militer Jaji (Klaassen, 2023). Selain itu, pada tahun 2021, Presiden Buhari membentuk Infrastruktur Keamanan Nasional Terpadu dan Perlindungan Jalur Air, yang dikenal sebagai Proyek *Deep Blue*, untuk melindungi perairan teritorial Nigeria dan Teluk Guinea dari pembajakan laut. Sebuah perusahaan Israel, *HLSI Security Systems and Technologies Limited*, disewa untuk mengelola kontrak proyek maritim senilai \$195 juta. Sejak awal, proyek ini, yang merupakan yang pertama dari jenisnya, telah menjadi subjek beberapa penyelidikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Nigeria, meskipun masih diperdebatkan di media lokal apakah ini bermotif politik atau demi kepentingan keamanan nasional (Klaassen, 2023).

Penolakan domestik terhadap penggunaan PMC sangat kuat di kalangan pejabat militer Nigeria. Pada tahun 2022, Babagana Zulum, gubernur Borno, kembali menegaskan seruannya untuk merekrut kembali PMC guna memerangi Boko Haram. Usulan ini sejak itu menjadi subjek penyelidikan parlemen. Meskipun beberapa pejabat pemerintah menyuarakan dukungan untuk menggunakan PMC dalam memerangi pemberontakan, pejabat militer menolak melibatkan aktor eksternal dalam konflik lokal dan regional. Kepala Pertahanan, Lucky Irabor, misalnya, menegaskan bahwa

adalah “tanggung jawab” angkatan darat Nigeria sendiri untuk memerangi teroris, bukan para pemangku kepentingan internasional (Klaassen, 2023). Hal ini juga didukung oleh Penasihat Keamanan Nasional Babagana Monguno, yang mengumumkan bahwa PMC tidak lagi diperlukan, karena angkatan darat telah mengembangkan keahlian operasional dan taktis untuk mengalahkan kelompok insurgensi Boko Haram. Menurut sebuah studi persepsi pada tahun 2016 oleh *Nigeria Security Network* (NSN), sebagian besar warga Nigeria (75%) mendukung penggunaan perusahaan militer swasta (PMC) untuk memerangi Boko Haram. Namun, studi tersebut juga mengungkapkan bahwa penolakan terhadap PMC paling kuat ketika mereka terlibat dalam pertempuran langsung, dan terdapat kekhawatiran publik bahwa PMC akan melakukan pelanggaran hak asasi manusia tanpa konsekuensi (Klaassen, 2023).

Dari sini kita dapat melihat sebuah pola baru pada sektor keamanan Nigeria, pasca penggunaan PMC oleh Goodluck Jonathan di tahun 2015. Setelah era Jonathan, pemerintah Nigeria selanjutnya melihat adanya peluang bagi mereka untuk mengikuti jejak Goodluck Jonathan dalam memanfaatkan layanan PMC sebagai pemenuhan kebutuhan keamanan negara. Hal inilah yang nantinya akan di bahas di bab 3 terkait faktor-faktor dan motif kepentingan apa yang mendasari keputusan Goodluck Jonathan dalam kasus penggunaan PMC di tahun 2015. Dengan mengetahui motif kepentingan Jonathan, maka terjawab sudah mengapa penggunaan PMC di Nigeria hingga saat ini masih menjadi pilihan alternatif yang sangat digemari oleh pemerintah Nigeria selanjutnya.